

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Kementerian PUPR

2.1.1 Zaman Belanda

Penggunaan Istilah kata “Pekerjaan Umum” berasal dari istilah kata pada bahasa Belanda yaitu “*Openbare Werken*”. Yang pada akhirnya digunakan dengan resmi pada saat Indonesia masih diduduki Pemerintahan Jepang pada waktu itu. Pada saat zaman Pekerjaan umum disebut sebagai *Waterstaat Swerken* atau Dept. V & W. Sebagian besar istilah “Pekerjaan Umum/*Openbare Werken*” diambil dan dikutip dari salah satu pengertian yang diberi oleh salah satu kolonial Belanda yang meliputi bidang Pekerjaan Umum itu sendiri sebagaimana berikut:

- a. Jalan raya umum, jembatan dan lalu lintas.
- b. Irigasi pada sawah, parit-parit dan air minum.
- c. Pembangunan seperti gedung dan perumahan pemerintah.
- d. Pengaturan perairan umum, aliran sungai, danau, muara dan mata air.
- e. PLTA (pembangkit listrik tenaga air).
- f. Bandara.
- g. Pelabuhan dan dermaga.

Dari pekerjaan – pekerjaan tersebut dibentuk sebuah organisasi pelaksanaan untuk melakukan pemeliharaan. Bentuk organisasi ini mengikuti kebijakan serta ketentuan – ketentuan dengan struktur pemerintahan (Idris, 1970).

Organisasi ini juga terbagi diberbagai daerah yang mencakup kelistrikan, pelabuhan dan penerbangan sipil sebagaimana berikut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2022):

1. Pada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur “*Waterstaat/Openbare Werken*” diberikan amanat kepada pemerintahan provinsi (*Provinciale Waterstaatsdienst*) dan dipimpin oleh Hoofd Provinciale Waterstaatsdiens (H.P.W).

2. Pada wilayah Yogyakarta dan pemerintahan, urusan – urusan pekerjaan umum diberikan dan tanggung jawab kesultanan yaitu *Sultanaatswerken* (Yogyakarta), *Rijkswerken* (Surakarta) dan *Mangkunegaranwerken*. Selain itu, wilayah yang dipimpin oleh *Vorstenlanden* ini memiliki 3 organisasi *Waterschap* yang mengurus perairan umum dan pekerjaan umum antara lain: Opak – Progo, Dengkeng dan Bengawan. Organisasi ini dipimpin oleh Dept. V. en W. pada wilayah – wilayah *Regentschap* (kabupaten) dan *Stadsgemeenten* (Kotapradja).

3. Pada wilayah luar Pulau Jawa seperti Pulau *Borneo* dan Pulau Sumatra serta Indonesia bagian timur mempunyai organisasi *Gewestelijke Inspectie Van de Waterstaat* yang dipimpin seseorang pengawas. Pada wilayah Riau dan Kepulauan Riau memiliki sebuah organisasi yang bernama “Residentie Water Staatsdienst” atau dikenal sebagai “*Dienst der B.O.W.*” dan kepala pimpinan bernama *Eerst Aanwezend Waterstaatsambtenaar* (E.A.W) yang mana menjadi orang yang paling pertama bertanggung jawab mengenai pekerjaan umum.

2.1.2 Zaman Jepang

Selepas berkobarnya peperangan antara sekutu dengan Jepang maka pada bulan Maret di tahun 1942 kolonial Hindia Belanda kalah dan menyerah serta memberikan wilayah Indonesia berada di bawah pemerintahan Jepang. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, sebagaimana berikut:

- a. Jakarta untuk Pulau Jawa dan Madura dikuasai oleh Militer Angkatan Darat (*Riku-Gun*).
- b. Bukittinggi dan Pulau Sumatra dikuasai oleh *Riku-Gun*.
- c. Makassar serta wilayah Indonesia Timur seperti *Borneo* (kalimantan), Sulawesi dan lainnya dikuasai oleh Militer Angkatan Laut (*Kai-Gun*).

Pada saat itu mulai diperbolehkan untuk memakai istilah “*Pekerdjaan Oemom*” (P.O), “*Oerosan Pekerdjaan Oemom*” (O.P.O), dan “*Pekerdjaan Umum*” (P.U). Yang berada disamping istilah Jepang “*Doboku*”. Organisasi lembaga pekerjaan umum di daerah tertentu dan tempat tinggal atau singgah presiden yang pada umumnya berdiri

sendiri – sendiri. Akan tetapi “*Kotubu Bunsitsu*” (Bandung) hanya memiliki hubungan pada wilayah di Jawa dan tidak mempunyai hubungan dengan luar Jawa. Tenaga kerja pada saat Pemerintahan Belanda menjabat, seluruhnya digantikan oleh tenaga kerja Jepang dan Indonesia (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2022).

2.1.3 Zaman Kemerdekaan

Ketika Indonesia merdeka dan memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh pemuda di Indonesia melakukan perebutan kekuasaan baik Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan di daerah – daerah. Pemerintahan Republik Indonesia membentuk kesatuan atas dasar Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan wilayah Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara. Ketika Belanda menginginkan kembali kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda terjadilah pertentangan dengan Pemuda Indonesia. Pada tahun 1945 – 1949, Pemerintahan Pusat Republik Indonesia memindahkan dari Jakarta ke Purworejo yang kemudian ke Yogyakarta yang diikuti oleh Kementrian PU.

Pada tahun 1949 Pemerintahan Belanda akhirnya menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dan Pemerintahan Pusat RI berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Sejak tahun 1945, pekerjaan umum telah mengalami banyak perubahan pimpinan dan organisasi tergantung situasi politik pada saat itu (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2022).

2.1.4 Visi dan Misi Kementrian PUPR

Adapun visi kementrian PUPR pada tahun 2015 – 2019 sebagaimana berikut (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2020):

a. Visi

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

b. Misi

Adapun misi kementerian PUPR yang menjadi salah satu rumusan mengenai upaya dan antisipasi yang akan dilakukan selama 2015 hingga 2019 untuk membantu pencapaian target dalam pembangunan nasional. Berdasarkan instruksi Kementerian PUPR yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014, tentang penataan tugas dan fungsi RPJMN Kabinet Ketenagakerjaan tahap III dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis. Sebagaimana berikut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2020):

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk sumber daya kelautan, untuk mendukung ketahanan air, swasembada pangan, dan swasembada energi untuk memimpin sektor-sektor strategis perekonomian domestik dalam kerangka kemandirian finansial.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional untuk memperkuat daya saing negara di kawasan global yang difokuskan pada hubungan laut dan darat.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung pelayanan infrastruktur dasar yang memadai untuk mencapai kualitas hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur konstruksi publik dan perumahan sosial yang terintegrasi dari ujung, didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas, untuk mencapai pembangunan antar daerah yang seimbang, terutama di daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah pedesaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya organisasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, termasuk sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian, urusan kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi administrasi, termasuk perencanaan terpadu,

organisasi yang efektif, pelaksanaan yang tepat dan kontrol yang ketat.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Stuktur Organisasi PUPR bagian Sekretariat Jendral
Sumber: Hasil Dokumentasi Praktikan

Berdasarkan **Gambar 2.1**, berikut pekerjaan dan tanggung jawab masing – masing bagian sturuktur organisasi sebagaimana berikut:

1. Sekretariat Jendral

Sekretariat Jendral merupakan jabatan tertinggi pada organisasi yang dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana, program, anggaran organisasi, peraturan undang – undang dan pemantauan terhadap barang milik negara serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2020).

2. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab untuk penyiapan kebijakan teknis, program, dan pengelolaan anggaran dan manajemen kesiapsiagaan bencana kementerian informasi dan teknologi informasi (Sekretariat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2017).

3. Bidang Manajemen Teknologi Informasi

Bidang Manajemen Teknologi Informasi bertugas dalam pengendalian, pengelolaan dan pengembangan keamanan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi Kementerian PUPR (Sekretariat

Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2017).

2.3 Kegiatan Umum Instansi/Perusahaan

Kegiatan umum pada Kementerian PUPR bergerak dibidang pelayanan dan pengelolaan infrastruktur yang memiliki tugas untuk urusan pemerintahan seperti membantu Presiden ketika menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada Kementerian PUPR sendiri memiliki tugas yang meliputi (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2020):

- a. Kementerian PUPR melakukan perumusan, penentuan dan pelaksanaan terkait bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, sistem pemasokan air minum, pengelolaan air limbah negeri, pengelolaan *drainase* lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta pembinaan jasa konstruksi.
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian PUPR.
- c. Bertugas mengelola barang milik/kekayaan negara dan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
- d. Pelaksanaan terhadap bimbingan teknis atas urusan PUPR di daerah.
- e. Melakukan penyusunan kebijakan teknis terkait rencana program infrastruktur PUPR dengan pendekatan pengembangan wilayah.
- f. Melakukan pengembangan SDM di Kementerian PUPR.
- g. Pelaksanaan fungsi lain oleh arahan Presiden.

Sedangkan kegiatan umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi bertanggung jawab pada beberapa tugas, yaitu (Sekretariat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2017):

- a. Merealisasikan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran terkait pengelolaan informasi dan teknologi informasi serta pengelolaan pengurangan risiko bencana kementerian.

- b. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, informasi geospasial dan audiovisual tematik di bidang infrastruktur PUPR.
- c. Bertanggung jawab atas promosi dan pengembangan sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TI, dan penerapan layanan pengadaan barang/jasa.
- d. Bertanggung jawab atas digitalisasi data dan pembuatan dokumentasi seluruh infrastruktur PUPR.



